

POSISI KELOMPOK LGBT DALAM BINGKAI MEDIA: STUDI WACANA KRITIS MICHEL FOUCAULT TERHADAP PEMBERTITAAAN LGBT PADA MEDIA DARING KOMPAS

LGBT POSITION ON MEDIA FRAME: MICHEL FOUCAULT'S CRITICAL DISCOURSE TOWARD LGBT NEWS ON KOMPAS ONLINE

Alfian Rokhmansyah

Universitas Mulawarman
Kampus Unmul Pahlawan, Jl. Harmonika, Samarinda, Kalimantan Timur

alfian.rokhmansyah@gmail.com

Abstract: *This study aims to reveal the position of LGBT groups in the mass media coverage, especially in Kompas.com online mass media. To achieve this goal, the study is based on the critical discourse model expressed by Michel Foucault's power relation. This research is a qualitative study using the method of critical discourse analysis. The object of analysis was the news text in Kompas.com online media for the November 2019 period regarding the prohibition of LGBT registering civil servants, which amounted to 11 reports. Based on the analysis that has been done on the news in Kompas.com media regarding the prohibition of LGBT registering civil servants of Attorney General, it is seen that there is discrimination formed by the ruling groups (Government and The Attorney General). With the repressive actions of the Attorney General against LGBT in the form of a ban on LGBT groups to register civil servants, the Attorney General tried to impose its ideology on society. This is done by producing news by the mass media as a means of winning public support. The power relations that are carried out by the dominant group by forming hate speech, hate crime, and curbing the resistance that is raised by the opposition groups (dominated groups).*

Keywords: *critical discourse, online media, LGBT, power relations*

Abstrak: Kajian yang dilakukan dalam artikel ini bertujuan untuk mengungkap posisi kelompok LGBT dalam pemberitaan media massa, khususnya dalam media massa daring *Kompas.com*. Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian dilandaskan pada model wacana kritis yang diungkapkan oleh Michel Foucault relasi kuasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan metode analisis wacana kritis. Objek analisis adalah teks berita di media massa daring *Kompas.com* periode November 2019 mengenai pelarangan LGBT mendaftar CPNS yang berjumlah 11 pemberitaan. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan terhadap pemberitaan di media *Kompas.com* mengenai pelarangan LGBT mendaftar CPNS Keagungan, terlihat adanya diskriminasi yang dibentuk oleh kelompok penguasa (Pemerintah dan Keagungan). Dengan adanya tindakan represif dari Keagungan terhadap LGBT dalam bentuk pelarangan kelompok LGBT untuk mendaftar CPNS, maka Keagungan mencoba memaksakan ideologinya terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memproduksi pemberitaan oleh media massa sebagai sarana memenangkan dukungan publik. Relasi kuasa yang dilakukan oleh kelompok dominan dengan cara membentuk ujaran kebencian, *hate crime*, dan mengekang resistensi yang dimunculkan oleh kelompok oposisi (kelompok terdominasi).

Kata kunci: wacana kritis, media daring, LGBT, relasi kuasa

1. PENDAHULUAN

LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) merupakan istilah yang digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa *komunitas gay* karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan (Swain, 2007). Dalam tatanan

masyarakat, LGBT merupakan komunitas minor yang ada di masyarakat. Selain sebagai komunitas minor, isu-isu terkait LGBT merupakan isu yang kontroversial pada tatanan global (Fatinova, Emha, & Mubarok, 2019). Keberhasilan penyebarannya dicapai melalui serangkaian gerakan pro-LGBT yang telah ada sejak lama (Encarnacion, 2014). Di Indonesia, arus penentangan terhadap LGBTQ terjadi lintas-agama, lintas-ideologi politik, dan bahkan lintas kelas sosial. Penolakan terhadap LGBT di Indonesia pernah diteliti lembaga survei *Saiful Mujani Research Center* (SMRC). Penelitian yang dilakukan selama 2016 sampai 2017 itu menemukan bahwa 58,3 persen warga Indonesia pernah mendengar tentang LGBT. Dari responden yang mengetahui tentang LGBT, sebanyak 41,1 persen di antaranya menyatakan LGBT tidak punya hak hidup di Indonesia (Garnesia, 2019).

Eksistensinya di Indonesia mengundang pro dan kontra dari banyak pihak. Pihak pro menilai LGBT sebagai hak-hak dasar warga negara. Banyaknya kaum LGBT yang mengalami tindak kekerasan semakin diperparah dengan adanya undang-undang yang cenderung diskriminatif terhadap LGBT (Fatinova et al., 2019). Di sisi lain, pihak kontra menyatakan bahwa eksistensi LGBT pada hakikatnya lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan terorisme dan narkoba (Republika, 2016). Selain itu, LGBT pun tidak selaras dengan sistem agama dan budaya yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan LGBT berbenturan dengan norma sosial dan adat istiadat yang ada di Indonesia.

Diskriminasi terhadap LGBT berasal dari stigmatisasi terhadap mereka yang memilih 'berbeda' dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Stigmatisasi ini berkembang begitu kental di dalam konteks masyarakat Indonesia. Hal ini yang akhirnya memunculkan homofobia dalam masyarakat, yaitu rasa takut terhadap homoseksual—dalam konteks penelitian ini adalah LGBT—yang terkadang bersumber pada keyakinan agama (Yudah, 2013). Homofobia erat pula kaitannya dengan kemunculan *hate crime*. Kata *hate* tidak selalu tentang kebencian, namun juga tentang bias dan prasangka. Terkadang apa yang menyebabkan terjadinya *hate crime* adalah ketidaksukaan, fanatisme, pikiran irasional, dan pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya terhadap objek yang kemudian menjadi sasaran kebencian (Jacobs & Potter, 1997).

Sejak 2016, kelompok LGBT mendapat tekanan melalui pemberitaan media massa. Berita di media massa pada tahun 2016, terutama berita daring, dipenuhi dengan ujaran kebencian (*media backlash*) yang menghantam LGBT. Berbagai hal tentang LGBT dibahas dari beragam topik, sudut pandang, dan kepentingan, tetapi mayoritas berita tersebut bermuara pada satu arah, yakni menyudutkan LGBT. Penyudutan ini dilakukan dengan memberikan stigma, seperti memiliki perilaku menyimpang; dianggap "sakit" sehingga perlu disembuhkan; melanggar moral agama dan norma masyarakat sehingga perlu diluruskan dan dibina; serta abnormal dan berdosa sehingga tidak pantas hidup di Indonesia dan harus ditekan perkembangannya (Listiorini, Asteria, & Hidayana, 2019).

Media massa merupakan salah satu alat untuk menyalurkan, mempublikasikan, dan memperlancar sampainya pesan komunikasi. Media massa juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang mau dan mampu menerjemahkan pesan komunikasi yang dimaksud komunikator ke dalam pesan komunikasi yang dapat dipahami komunikannya. Media massa juga merupakan alat atau mediator yang efektif dalam publikasi ideologi, baik ideologi pro maupun kontra terhadap suatu diskursus. Eriyanto (2015) mengungkapkan bahwa teks merupakan salah satu bentuk praktik ideologi, bahasa, tulisan, pilihan kata maupun struktur gramatika dipahami sebagai pilihan yang diungkapkan membawa makna ideologi tertentu dalam taraf memenangkan dukungan publik.

Proses-proses itu diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan atau konstruksi realitas. Hamad menyatakan bahwa proses mengonstruksi realitas melalui media massa. Pada prinsipnya upaya mengonseptualisasi sebuah peristiwa, keadaan atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha mengonstruksi realitas (Hamad,

2004). Media berusaha menyusun realitas dari berbagai peristiwa hingga menjadi wacana yang berarti. Dengan demikian, seluruh isi media tidak lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*reconstructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna (Badara, 2012).

Sebenarnya pers memiliki tugas besar dan mulia: mengembangkan wacana yang sehat demi kepentingan rakyat banyak. Secara lebih khusus, pers seyogianya lebih berempati kepada pihak-pihak yang dirugikan dan menderita (Mulyana, 2008). Untuk mencapai tugas mulia tersebut, jurnalisme pertama-tama harus memegang kebenaran. Kebenaran ini diabdikan untuk kepentingan warga. Inti sari jurnalisme adalah disiplin dan verifikasi sehingga bisa memantau kekuasaan dan menyuarakan kaum yang tak bersuara (Jupriono, Wibowo, & Marsih, 2013).

Kompas merupakan salah satu media massa skala nasional di Indonesia. *Kompas* memiliki media publikasi daring pada laman *Kompas.com*. Sebagai bagian dari media nasional, berita-berita yang disajikan oleh *Kompas.com* juga mengikuti alur pemberitaan pada media massa versi cetaknya. Isu yang disajikan tidak hanya seputar hal-hal sepele, tetapi juga hal-hal yang dianggap kontroversial, seperti isu LGBT. Dari isu LGBT yang diangkat *Kompas.com* tersebut, terlihat bahwa LGBT tidak hanya dikategorikan sebagai penyimpangan namun juga penipu dan kriminal. Oleh karena itu, media massa sebenarnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam merepresentasikan LGBT.

Pemberitaan di media massa bisa diibaratkan sebuah lingkaran yang berhubungan dengan sistem yang berkembang di masyarakat, aturan norma yang dianggap sebagai patokan, dan interpretasi terhadap suatu fenomena. Semua hal tersebut berbentuk lingkaran yang saling mempengaruhi. Hal ini senada dengan pendapat Whittle (2002) yang menyatakan bahwa teks yang terdapat dalam berita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Teks tersebut akan memproduksi wacana yang berfungsi melanggengkan adat, memproduksi relasi kekuasaan, dan memiliki efek ideologi.

Kajian yang dilakukan dalam artikel ini bertujuan untuk mengungkap posisi kelompok LGBT dalam pemberitaan media massa, khususnya dalam media massa daring *Kompas.com*. Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian dilandaskan pada model wacana kritis yang diungkapkan oleh Michel Foucault relasi kuasa. Wacana (*discourse*) dalam konsep Foucault adalah artikulasi ideologis dari kenyataan yang dibentuk oleh kelompok-kelompok yang saling berkompetisi untuk memperebutkan kebenaran tafsir sejarah, termasuk di dalamnya wacana agama. Oleh karena itu, wacana adalah konstruksi ideologis (*ideological construction*) yang dipakai untuk melegitimasi, mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan. Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) model Foucault merupakan salah satu metode analisis teks media untuk membongkar bagaimana cara media mengonstruksi sebuah wacana. Analisis wacana menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Analisis wacana kritis melihat pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai praktik sosial. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk di dalamnya praktik kekuasaan (Eriyanto, 2015).

Analisis wacana mengacu pada pemikiran Michel Foucault meliputi metode analisis genealogi kuasa dan analisis arkeologi pengetahuan. Proses genealogi adalah memeriksa serangkaian wacana terbentuk, analisis hubungan kesejarahan antara kuasa dengan wacana dan bukan menyelidiki suatu konspirasi melalui kesadaran aktor-aktornya (Foucault, 1994; Ritzer, 2003). Sedangkan arkeologi pengetahuan memungkinkan penyelidikan peristiwa-peristiwa wacana, pernyataan-pernyataan yang dibincangkan dan dituliskan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui analisis kearsipan suatu teks. Arkeologi adalah analisis wacana dalam bentuk kearsipannya. Arkeologi menggambarkan wacana-wacana sebagai praksis-praksis yang dikhususkan dalam elemen sebuah arsip (Foucault, 2002).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan wacana kritis. Objek penelitian berupa teks berita tentang pelarangan LGBT mendaftar CPNS di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diterbitkan oleh *Kompas.com*. Adapun berita yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah berita daring yang muncul selama November 2019 berjumlah 11 wacana berita. Analisis data dilakukan dengan model analisis wacana kritis menurut Michel Foucault, khususnya pada genealogi kuasa dan arkeologi pengetahuan.

Tabel 1. Daftar Berita Bertopik LGBT pada *Kompas.com* November 2019

No. Data	Tanggal	Judul
Data 1	22 November 2019	LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi
Data 2	22 November 2019	LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya
Data 3	23 November 2019	LGBT Dilarang Ikut Tes CPNS, PDI-P: Jangan Mengotak-Ngotakkan Perbedaan
Data 4	25 November 2019	Setara Nilai Ketentuan Orientasi Seksual dalam Tes CPNS Diskriminatif
Data 5	25 November 2019	Polemik Dilarangnya Peserta LGBT Ikut Tes CPNS 2019
Data 6	27 November 2019	Kejaksaan Agung Larang LGBT Lamar CPNS 2019, Tim Medis dan Psikolog Akan Lakukan Deteksi
Data 7	27 November 2019	Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Data 8	27 November 2019	Kelompok Minoritas Seksual Protes Larangan LGBT Daftar CPNS Kejagung
Data 9	27 November 2019	Kejaksaan Agung Klaim Punya Landasan Hukum Larang LGBT Jadi Peserta CPNS 2019
Data 10	28 November 2019	Komnas HAM: Negara Tak Boleh Batasi Hak Warga karena Orientasi Seksual
Data 11	29 November 2019	Ramai Partai Gerindra Tolak Aturan CPNS Kejagung soal LGBT

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus tentang LGBT adalah bagian dari diskursus seksualitas. Pada diskursus mengenai seksualitas, terdapat dua konsep penting yang tidak dapat diabaikan, yakni kekuasaan dan ideologi dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan dikaitkan terutama pada tubuh dan menyebabkan munculnya relasi kuasa dari pihak-pihak otoritas tertentu atas pihak lain. Institusi atau lembaga adalah tempat bekerjanya kekuasaan yang diskursif.

Pada pemberitaan di media massa yang mengandung isu LGBT, selalu ditemukan homofobia terhadap kelompok LGBT. Hal ini juga ditemukan pada berita yang dimuat pada laman *Kompas.com* terkait pemberitaan LGBT. Media terkadang membingkai LGBT sebagai manusia yang kehilangan haknya sebagai warga negara. Media yang cenderung menolak kegiatan LGBT. Pembingkai berita dilakukan untuk menolak segala bentuk aktivitas, perilaku, kampanye, gerakan, pendanaan, serta usaha pelegalan LGBT, termasuk hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia, khususnya norma agama (Nirwanto, 2016).

Pemberitaan yang dilakukan *Kompas.com* mengenai pelarangan LGBT mendaftar CPNS Kejagung merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan terhadap kelompok minoritas. Hal ini berhubungan dengan konsep menurut Foucault (1990) bahwa kekuasaan selalu muncul ketika terdapat perbedaan dan diskriminasi. Kekuasaan menyebar tanpa dapat dilokalisasi—ada di mana-mana—meresap dalam seluruh relasi sosial; subjek kekuasaan tidak harus seorang raja, perdana menteri, atau presiden terhadap rakyatnya, bahkan ia bisa muncul dalam relasi

suami istri, sepasang kekasih, dokter-pasien, psikiater-klien, dosen-mahasiswa, antarmahasiswa, antarburuh, dst (Jupriono et al., 2013).

Sesuai dengan konsep Foucault tersebut, dalam konteks pelarangan LGBT mendaftar CPNS Kejagung, relasi kuasa muncul antara penguasa dengan kelompok bawahan. Artinya, kekuasaan muncul karena adanya relas-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis (Kamahi, 2017). Dalam hal ini, terbentuk dua kelompok, yaitu kelompok borjuis dan kelompok proletar. Kelompok borjuis terbentuk karena adanya relasi dari tataran paling tinggi (Pemerintah) dan tataran di bawahnya (Kejagung). Sedangkan LGBT dianggap sebagai proletar. Masing-masing kelompok ini memiliki relasi-relasi yang beragam.

Dalam pemberitaan terbentuk dua jaringan, yaitu jaringan Pemerintah-Kejagung sebagai pihak kontra LGBT, dan jaringan LGBT-Komnas HAM-Parpol sebagai pihak pro LGBT. Partai politik yang termasuk jaringan pro LGBT adalah parpol yang memberikan tanggapan negatif terhadap keputusan Kejagung melarang pelamar LGBT untuk mengikuti CPNS. Kemunculan oposisi jaringan ini, umumnya akan menimbulkan tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh kelompok borjuis (Pemerintah) terhadap kelompok proletar (LGBT). Kejagung sebagai agen pemerintah (aparatur negara) merupakan 'komite' untuk mengatur urusan kelompok borjuis, melanggengkan kekuasaan, mempercepat dan memperkuat proses kapitalisasi, serta menindas atas nama kepentingan kaum borjuis (Marx dalam Adi, 2018). Aparatur negara memiliki kekuatan intervensi dan pelaksana represi untuk 'kepentingan kelas yang berkuasa' dalam perjuangan kelas yang dilakukan oleh kelompok borjuis dan sekutunya melawan proletariat. Aparat negara sebagai *repressive state apparatus* berfungsi dengan kekerasan, baik represi fisik maupun non-fisik, seperti represi administrasi, ekonomi, dan sebagainya (Althusser, 2015).

Dengan adanya tindakan represif dari Kejagung terhadap LGBT dalam bentuk pelarangan kelompok LGBT untuk mendaftar CPNS, maka Kejagung mencoba memaksakan ideologinya terhadap masyarakat. Hal ini yang kemudian diproduksi oleh media massa yang bertugas sebagai sarana publikasi ideologi. Teks dalam pemberitaan media massa membawa makna ideologi tertentu dalam memenangkan dukungan publik (Eriyanto, 2015).

Proses publikasi ideologi yang dibangun oleh media massa dilakukan dengan penggunaan kata dalam pemberitaan. Penggunaan kata yang digunakan untuk merepresentasikan LGBT, yaitu penggunaan kata *kelainan*, yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk homofobia. Bentuk ini termasuk dalam ujaran kebencian. Kata *kelainan* ditemukan pada Data 5, Data 6, Data 9, dan Data 10.

Penggunaan kata *kelainan* tersebut oleh redaksi merupakan keterkaitan dengan argumen yang diberikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kejagung. Redaksi juga menuliskan argumen tersebut pada beberapa pemberitaan.

(1)

"Di setiap hari-harinya dia bergelut dengan para tahanan, para terpidana, yang notabene berada dalam kekuasaannya. Ketika seorang jaksa mempunyai **kelainan**, kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan," katanya.

(2)

"Di setiap hari-harinya dia bergelut dengan para tahanan, para terpidana, yang notabene berada dalam kekuasaannya. Ketika seorang jaksa mempunyai **kelainan**, kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan," kata Mukri kepada Kompas.com, Selasa (26/11/2019).

(3)

Menurut dia, seorang jaksa memiliki kewenangan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Kejagung khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan apabila jaksa memiliki, seperti yang dituturkan Mukri, yaitu **kelainan**.

Pada kutipan (1), (2), dan (3) di atas, penggunaan kata *kelainan* memunculkan adanya prasangka yang akhirnya membentuk stereotip terhadap LGBT. Stereotip yang dimunculkan melalui kata *kelainan* ini akhirnya menyebabkan *hate crime*. *Hate crime* merupakan istilah yang merujuk kepada tingkah laku kejahatan, tidak hanya karena kebencian tetapi juga karena prasangka, walaupun terkadang merupakan gabungan keduanya. Secara umum, *hate crime* membedakan antara kejahatan yang dilakukan karena prasangka dari kejahatan yang dilakukan karena nafsu, cemburu, kerakusan, politik dan yang lainnya (Yudah, 2013). *Hate crime* yang merupakan akibat dari prasangka memunculkan diskursus bahwa LGBT akan memberikan dampak negatif pada keprofesionalitasan ketika menangani penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa jaringan pemerintah memiliki kebencian terhadap LGBT.

Temuan-temuan di atas, meletakkan LGBT sebagai pihak yang tidak dominan atau submissive dan hanya menjadi objek media karena keberadaannya dianggap sebagai hal yang tidak normal, tidak umum, menyimpang, bahkan berbahaya dalam masyarakat Indonesia yang pada dasarnya konservatif terkait topik seksualitas (Aspinall, 2014). LGBT dimarginalkan oleh media melalui posisi objek yang secara representatif tidak memiliki kekuasaan yang dinarasikan melalui bahasa di media. Posisi pemerintah sebagai subjek yang berkuasa dan dominatif dalam pemberitaan menjadikan LGBT sebagai objek yang tidak berdaya.

Pada Data 6 dan Data 10, terdapat ungkapan yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kejagung. Ungkapan tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian yang bersumber dari pengetahuan agama.

(4)

"Kita lihat dari sisi norma agama, semua agama di Indonesia ini belum ada yang menerima terkait dengan LGBT," ujar Mukri.

Pada kutipan di atas, ungkapan Kepala Pusat Penerangan Kejagung yang menggunakan klausa *semua agama di Indonesia ini belum ada yang menerima terkait dengan LGBT*. Hal ini merupakan bentuk arkeologi pengetahuan yang dimiliki oleh pengujar. Ujaran kebencian yang dilontarkan pejabat pemerintah di Indonesia terhadap LGBT melalui media pada akhirnya bukan sebatas pilihan personal, namun berubah menjadi diskursus yang politis.

Pemberitaan yang dilakukan oleh *Kompas.com* selain bertujuan sebagai sarana publikasi ideologi kelompok dominan dalam memenangkan dukungan publik. Sepertinya *Kompas.com* juga memiliki tujuan untuk menunjukkan adanya perlawanan atau resistensi terhadap kekuasaan. Dalam berita-berita yang ditampilkan *Kompas.com*, resistensi muncul dari kelompok tertindas (LGBT) dan jaringannya. Resistensi yang dilakukan oleh kelompok LGBT dan jaringannya merupakan akibat dari kekuasaan yang menindas dan mendiskriminasi terhadap kelompok LGBT. Pemberitaan yang merupakan produk sarana publikasi ideologi kelompok dominan yang dilakukan oleh media massa, dilakukan pada Data 2, Data 5, Data 6, Data 7, dan Data 9.

Pada Data 7, ada dukungan terhadap Kejagung dari Anggota Komisi II DPR RI yang mengatakan bahwa orientasi seksual dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, ada ungkapan yang seakan-akan mendukung LGBT untuk mendapatkan hak sebagai warga negara.

(5)

"Satu-satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah untuk mengekspos dan mengembangkan perilakunya bersama kepada masyarakat umum," ungkapnya, Rabu (27/11/2019).

Pemberitaan oleh media massa yang merupakan resistensi kelompok LGBT dan jaringannya ditemukan pada Data 1, Data 3, Data 4, Data 8, Data 10, dan Data 11. Pada Data 1, pemberitaan mengekspos ungkapan Asrul Sani yang merupakan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP. Beliau memberikan ungkapan bahwa pelarangan yang diberikan oleh Kejagung merupakan bentuk diskriminasi. Padahal DPR merupakan kelompok dominan yang berada dalam jaringan relasi kuasa pemerintah.

(6)

Menurut Arsul, sepanjang seseorang tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia, maka tidak jadi soal seorang LGBT menjadi pada lembaga negara.

Selain itu, pada Data 4 terdapat bentuk resistensi dari jejaring LGBT terhadap pelarangan yang diberikan oleh Kejagung. Bentuk resistensi ini juga menganggap bahwa pelarangan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap LGBT.

(7)

"Itu diskriminatif, kan orientasi seksual, identitas personal seseorang kan mestinya tidak bisa menghalangi," ucap Direktur Riset Setara Institute, Halili, usai sebuah acara di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Selain itu, Halili juga mempermasalahkan dasar hukum terkait ketentuan tersebut.

"Kalau kita misalnya akhirnya harus melihat orang dari sisi orientasi seksualnya, apa dasar hukum paling legal, paling formal, paling tepat, untuk mengidentifikasi orientasi seksual itu, kan tidak ada," kata dia.

Media massa sebagai sarana membawa makna ideologi tertentu dalam taraf memenangkan dukungan publik, melakukan pembingkai (*framing*) terhadap kelompok yang mendominasi maupun yang terdominasi. *Kompas.com* dalam pembingkaiannya meletakkan LGBT sebagai kelompok yang selalu ditindas dan mendapatkan diskriminasi. Artinya, pembingkai yang dilakukan *Kompas.com* merupakan sarana untuk mendukung relasi kuasa yang ingin dibangun oleh kelompok dominan dan jaringannya. Sedangkan pemerintah dan pihak otoritas dibingkai sebagai penyebab masalah, yang seharusnya bertanggung jawab melindungi hak LGBT sebagai warga negara. Dari ungkapan pejabat publik yang terus dikutip media, justru semakin memberatkan kehidupan LGBT. Bahkan menyebabkan kekerasan dan diskriminasi terhadap LGBT, serta merupakan bentuk pelanggaran konstitusi di Indonesia.

Walaupun terdapat resistensi dari kelompok-kelompok pro-LGBT, tetapi LGBT tidak serta-merta dapat keluar dari kekuasaan kelompok dominan (Pemerintah dan Kejagung). Sebagaimana diungkapkan oleh Foucault, di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti-kekuasaan (*resistance*). Resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu. Setiap orang yang berada dalam kekuasaan, tidak jalan untuk keluar darinya (Foucault, 1990; Kamahi, 2017).

4. KESIMPULAN

LGBT merupakan komunitas minor yang ada di masyarakat. Di Indonesia, arus penentangan terhadap LGBTQ terjadi lintas-agama, lintas-ideologi politik, dan bahkan lintas kelas sosial. Eksistensinya di Indonesia mengundang pro dan kontra dari banyak pihak. Pihak pro menilai LGBT sebagai hak-hak dasar warga negara. Di sisi lain, pihak kontra menyatakan bahwa eksistensi LGBT tidak selaras dengan sistem agama dan budaya yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan terhadap pemberitaan di media *Kompas.com* mengenai pelarangan LGBT mendaftar CPNS Kejawang, terlihat adanya diskriminasi yang dibentuk oleh kelompok penguasa (Pemerintah dan Kejawang). Dengan adanya tindakan represif dari Kejawang terhadap LGBT dalam bentuk pelarangan kelompok LGBT untuk mendaftar CPNS, maka Kejawang mencoba memaksakan ideologinya terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memproduksi pemberitaan oleh media massa sebagai sarana memenangkan dukungan publik. Relasi kuasa yang dilakukan oleh kelompok dominan dengan cara membentuk ujaran kebencian, *hate crime*, dan mengekang resistensi yang dimunculkan oleh kelompok oposisi (kelompok terdominasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Y. K. (2018). Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Tindakan Represif Aparat terhadap Warga Penolak Pembangunan NYIA di Koran KR dan Harjo. *Ilmu Komunikasi*, 1(1), 17–32.
- Althusser, L. (2015). *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Catatan-Catatan Investigasi)*. Indoprogres.
- Aspinall, E. (2014). Sex, Lies and Politicians. Diambil 3 Mei 2020, dari Inside Indonesia website: <https://www.insideindonesia.org/sex-lies-and-politicians>
- Badara, A. (2012). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana (Prenata Media Grup).
- Encarnacion, O. G. (2014). Gay Rights : Why Democracy Matters. *Journal of Democracy*, 25(3), 90–102. Diambil dari <https://www.journalofdemocracy.org/articles/gay-rights-why-democracy-matters/>
- Eriyanto. (2015). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fatinova, D., Emha, R. J., & Mubarak, Y. (2019). Representasi LGBT dalam Perspektif Ideologi Khilafah: Kajian Transistivitas dalam Buletin Kaffah. *Buletin Al-Turas*, 25(2), 343–358. <https://doi.org/10.15408/bat.v25i2.13161>
- Foucault, M. (1990). *The History of Sexuality: Volume 1*. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. (1994). *The Order of Things: Archeology of the Human Sciences*. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. (2002). *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: Qalam.
- Garnesia, I. (2019, Juni 29). Pandangan Terhadap LGBT: Masih Soal Penyakit Sosial dan Agama. *Tirto.id*. Diambil dari <https://tirto.id/pandangan-terhadap-lgbt-masih-soal-penyakit-sosial-dan-agama-edju>
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Jacobs, J. B., & Potter, K. A. (1997). Hate Crimes: A Critical Perspective. *Crime and Justice*, 22, 1–50. Diambil dari <https://www.jstor.org/stable/1147570>
- Jupriono, D., Wibowo, Y. H., & Marsih, L. (2013). Teks Berita Konflik Pekerja PT Freeport

- Indonesia: Analisis Wacana Kritis Foucault. *Parafrase*, 13(1), 53–63.
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(1), 117–133.
- Listiorini, D., Asteria, D., & Hidayana, I. (2019). Diskursus Ujaran Kebencian Pemerintah pada Kasus LGBT di Media Daring. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(2), 243–258.
- Mulyana, D. (2008). *Komunikasi Massa: Kontroversi, Teori, Aplikasi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Nirwanto, G. D. (2016). Pembungkahan Berita Pro Kontra LGBT di Laman Topik Pilihan Kompas.com. *Jurnal E-Komunikasi*, 4(1), 1–12.
- Republika. (2016, Februari 28). LGBT Lebih Berbahaya Daripada Terorisme dan Narkoba. *Republika*. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/28/o39j6u384-lgbt-lebih-berbahaya-daripada-terorisme-dan-narkoba>
- Ritzer, G. (2003). *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Swain, K. W. (2007, Juni 21). Gay Pride Needs New Direction. *Denver Post*. Diambil dari <https://www.denverpost.com/2007/06/21/gay-pride-needs-new-direction/>
- Whittle, S. (2002). *Respect and Equality: Transexual and Transgender Rights*. London: Cavendish Publishing.
- Yudah, A. A. P. (2013). Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 37–49.